

Implementasi Kebijakan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Studi Kasus Di Desa Wisata Argo Wijil Kalurahan Gari, Kapanewon Wonosari)

Tasya noviasari¹, Djuniawan Karna Djaja², Vibriza juliswara³

¹²³ Universitas Gunung kidul

Program Studi Administrasi Publik Universitas Gunung kidul

E-mail: tasyanoviasari@gmail.com, dkarnadjaja@gmail.com, vbjuliswara@gmail.com

KEYWORDS

Policy Implementation
Tourism
Community Empowerment
Sustainable Tourism

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Gunungkidul Regency Regional Regulation Number 7 of 2023 concerning Tourism Management in Argo Wijil Tourism Village. This research uses a descriptive qualitative approach by collecting data through interviews, observation, and documentation. The results show that the implementation of this policy has had a positive impact, especially on increasing economic opportunities and community empowerment. However, there are still obstacles in optimizing resources, bureaucratic coordination, and community participation. Therefore, further efforts are needed to improve communication, optimize resources, and strengthen organizational structures to achieve sustainable tourism management.

Kata Kunci

Implementasi Kebijakan
Kepariwisata
Pemberdayaan Masyarakat
Kebijakan pariwisata

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Desa Wisata Argo Wijil. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini telah memberikan dampak positif, terutama dalam peningkatan peluang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam optimalisasi sumber daya, koordinasi birokrasi, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dalam meningkatkan komunikasi, optimalisasi sumber daya, serta penguatan struktur organisasi demi mencapai pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Gunungkidul merupakan salah satu destinasi pariwisata unggulan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi alam, budaya, dan kearifan lokal yang luar biasa. Keindahan alam Gunungkidul tercermin dari pantai-pantai eksotis, gua karst yang menawan, serta perbukitan yang menyuguhkan panorama memukau. Selain itu, kekayaan budaya seperti tradisi adat, seni pertunjukan, dan kerajinan khas semakin memperkaya daya tarik wilayah ini.

Perkembangan sektor pariwisata di Gunungkidul dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang positif, didukung oleh peningkatan infrastruktur, promosi yang masif, dan kebijakan pemerintah daerah yang proaktif. Dampak dari perkembangan ini terlihat dari peningkatan kunjungan wisatawan serta

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, jumlah kunjungan wisatawan meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir, dengan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, di balik perkembangan tersebut, muncul tantangan seperti ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, dan ancaman terhadap pelestarian budaya lokal. Ketimpangan ekonomi terlihat dari belum meratanya manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal, sementara kerusakan lingkungan terjadi akibat aktivitas wisata yang tidak terkontrol, seperti pembuangan sampah sembarangan dan eksploitasi sumber daya alam. Di sisi lain, modernisasi yang pesat berpotensi menggerus tradisi dan budaya lokal yang menjadi identitas Gunungkidul.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Desa Wisata Argo Wijil menjadi salah satu lokasi implementasi kebijakan ini, di mana pasar ekologis yang dikembangkan di lahan bekas tambang menjadi ikon inovasi pariwisata berbasis masyarakat.

Pasar Ekologis Argo Wijil merupakan contoh nyata bagaimana revitalisasi lahan bekas tambang dapat diubah menjadi destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan keindahan alam tetapi juga memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Dengan konsep ekowisata, pasar ini mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah serta pelestarian budaya melalui berbagai kegiatan seperti festival seni dan pelatihan usaha. Keberhasilan konsep ini menunjukkan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya partisipasi aktif masyarakat, dan koordinasi birokrasi yang belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan tersebut berjalan dan dampaknya bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pemberdayaan ekonomi dan pelestarian budaya. Dengan mengkaji faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 di Desa Wisata Argo Wijil. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali

informasi yang bersifat kontekstual dan mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam melibatkan empat informan kunci, yaitu Lilik Rahmat Purnomo, S.H. (Carik Kalurahan Gari), Dodi Rizki Pradana (Pangripat Kelurahan Gari), Septiana Nurmansah, S.Sn. (Koordinator Pengurus BUMDes Pasar Argo Wijil), dan Nuryanto (Koordinator Kepala Unit Pasar Argo Wijil/Lurah Pasar). Selain itu, penelitian ini juga melibatkan tiga informan pendukung, yaitu Bu Ari (Pedagang/Tokoh Masyarakat), Bu Kiyem (Pedagang/Tokoh Masyarakat), dan Dwi (Pedagang). Pemilihan informan dilakukan menggunakan purposive sampling, mempertimbangkan peran dan keterlibatan mereka dalam implementasi kebijakan.

Observasi partisipatif dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas di Pasar Ekologis Argo Wijil, seperti kegiatan perdagangan, penyelenggaraan acara budaya, dan pelaksanaan program pelestarian lingkungan. Observasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika interaksi antara pelaku kebijakan dan masyarakat serta mengevaluasi sejauh mana implementasi kebijakan telah diterapkan di lapangan.

Studi dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dokumen-dokumen yang dianalisis meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023, laporan kegiatan Pasar Ekologis Argo Wijil, serta data pendapatan pedagang sebelum dan sesudah implementasi kebijakan. Analisis dokumen ini memberikan konteks historis dan administratif yang mendukung interpretasi data primer.

Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dan penting untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi

deskriptif yang dilengkapi dengan tabel dan grafik jika diperlukan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan temuan penelitian berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III, yang mencakup aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur organisasi.

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi data melalui tiga pendekatan: (1) **triangulasi sumber**, yaitu membandingkan informasi dari berbagai narasumber seperti pemerintah desa, BUMDes, pedagang, dan wisatawan; (2) **triangulasi metode**, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk meningkatkan validitas data; serta (3) **triangulasi teori**, yang menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III sebagai kerangka analisis untuk menafsirkan temuan penelitian secara lebih objektif. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan pariwisata di Desa Wisata Argo Wijil

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Kebijakan

Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 di Desa Wisata Argo Wijil dianalisis menggunakan teori Edward III yang menekankan empat aspek penting: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur organisasi. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan ini telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat berbagai kendala yang perlu diatasi.

Aspek komunikasi memainkan peran penting dalam penyebaran informasi mengenai kebijakan ini. Sosialisasi kebijakan dilakukan melalui berbagai forum, seperti musyawarah desa, diskusi kelompok terfokus, dan penyebaran informasi melalui media sosial. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara mendalam tujuan dan manfaat kebijakan ini, sehingga diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih intensif dan partisipatif. Perlu adanya penyampaian informasi yang lebih inovatif, seperti pemanfaatan media visual dan

audio, serta kegiatan langsung seperti pelatihan dan simulasi program agar masyarakat dapat lebih memahami implementasi kebijakan tersebut.

Dari segi sumber daya, keterbatasan dana dan tenaga ahli menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Program pelatihan dan pendampingan yang dirancang sering kali terkendala oleh minimnya anggaran, sementara kebutuhan akan pendampingan teknis dalam bidang pariwisata dan pengelolaan usaha masih cukup tinggi. Pemerintah desa dan BUMDes berupaya menggalang kemitraan dengan pihak swasta dan lembaga pendamping guna memperluas dukungan sumber daya. Upaya ini juga melibatkan pelibatan akademisi dan praktisi pariwisata untuk memberikan kontribusi keilmuan dan praktik terbaik dalam pengelolaan destinasi wisata.

Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang kuat dalam mendukung implementasi kebijakan. Pemerintah desa, pengelola pasar, dan BUMDes aktif dalam mengembangkan program-program yang mendukung pengelolaan pariwisata berbasis masyarakat. Meski demikian, partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung kegiatan budaya lokal. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan aktif dalam menjaga keberlanjutan program pariwisata ini.

Struktur organisasi dalam implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, BUMDes, dan komunitas lokal. Meskipun koordinasi antarinstansi telah terjalin, masih terdapat tantangan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan struktur organisasi melalui pembentukan tim kerja lintas sektor yang mampu mengintegrasikan berbagai program dan kegiatan. Penyusunan pedoman kerja yang jelas dan terukur juga menjadi langkah penting untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, implementasi Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 telah memberikan dampak positif dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Wisata Argo Wijil. Namun, untuk mencapai keberlanjutan yang optimal, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam mengatasi kendala komunikasi, optimalisasi sumber daya, penguatan disposisi pelaksana, dan peningkatan koordinasi antarinstansi.

3.1.1 Faktor Pendorong Implementasi Kebijakan

Faktor Pendorong Implementasi Kebijakan Terdapat beberapa faktor yang mendukung keberhasilan implementasi Perda ini di Desa Wisata Argo Wijil. Pertama, dukungan penuh dari pemerintah desa dan BUMDes menjadi pendorong utama dalam pelaksanaan berbagai program pengembangan pariwisata. Kebijakan yang didukung dengan regulasi yang jelas dan perencanaan yang terstruktur memberikan fondasi kuat dalam implementasi di lapangan. Kedua, tingginya potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki desa ini menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, sehingga mendorong pengembangan pariwisata berbasis komunitas. Keindahan alam seperti perbukitan, gua karst, dan pasar ekologis menjadi magnet wisata yang memperkaya destinasi. Ketiga, adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar wisata dan penyelenggaraan acara budaya menunjukkan komitmen masyarakat dalam mendukung implementasi kebijakan. Peran aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan, seperti program pelestarian lingkungan dan pelatihan keterampilan, semakin memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Selain itu, dukungan dari pihak akademisi dan lembaga pendamping menjadi faktor tambahan yang memperkuat implementasi kebijakan ini. Kolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian menghadirkan pendampingan teknis dan pelatihan berbasis ilmu pengetahuan, yang membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dan pengelola destinasi wisata. Keterlibatan media lokal juga berperan dalam menyebarkan informasi dan promosi mengenai potensi Desa Wisata Argo Wijil,

sehingga menarik lebih banyak wisatawan dan investor.

3.1.2 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Meskipun banyak faktor pendukung, pelaksanaan kebijakan ini juga menghadapi beberapa hambatan. Keterbatasan dana menjadi kendala utama dalam pengembangan fasilitas dan pelaksanaan program pelatihan. Anggaran yang terbatas menghambat optimalisasi infrastruktur dan pengadaan sarana pendukung wisata. Selain itu, kurangnya tenaga ahli dalam bidang pariwisata dan pemberdayaan masyarakat menyebabkan program pendampingan belum berjalan optimal. Keterbatasan ini berimbas pada minimnya inovasi dalam pengelolaan destinasi wisata.

Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya juga menjadi tantangan dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan. Masih terdapat warga yang kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan dan kelestarian tradisi lokal, sehingga mengurangi daya tarik wisata. Di sisi lain, koordinasi antarinstansi yang belum optimal sering kali menghambat pelaksanaan program, terutama dalam hal pembagian peran dan tanggung jawab.

Selain itu, keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi umum, dan fasilitas umum lainnya menjadi kendala dalam menarik minat wisatawan. Kurangnya promosi yang terarah dan berkelanjutan juga berdampak pada rendahnya jumlah kunjungan wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dalam mengatasi berbagai hambatan ini agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lebih optimal.

3.1.3 Dampak Implementasi Kebijakan

Implementasi Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 telah memberikan dampak

positif yang signifikan bagi Desa Wisata Argo Wijil, terutama dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dari segi ekonomi, kebijakan ini mendorong peningkatan pendapatan masyarakat melalui aktivitas perdagangan di pasar wisata serta pertumbuhan jumlah wisatawan. Sebelum kebijakan diterapkan, rata-rata penghasilan pedagang berat berkisar Rp1.000.000 - Rp1.200.000 per kali jualan, sementara pedagang ringan memperoleh Rp300.000 - Rp500.000. Setelah kebijakan berjalan, pendapatan pedagang berat meningkat menjadi Rp1.300.000 - Rp1.500.000, dan pedagang ringan mencapai Rp500.000 - Rp700.000 per kali jualan.

Tabel 1. Perbandingan Pendapatan Pedagang Sebelum dan Sesudah Kebijakan

Pedagang	Sebelum kebijakan	Sesudah kebijakan	Presentase kenaikan
Pedagang berat	1.000.000 - 1.200.000	1.300,000 - 1.200,000	25 %
Pedagang ringan	300.000 - 500,000	500,000 - 700,000	40 %

Selain peningkatan pendapatan, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Pasar Wisata Argo Wijil juga mengalami lonjakan. Sebelum kebijakan diterapkan, jumlah wisatawan rata-rata mencapai 10.500 orang per tahun, sedangkan setelah kebijakan berjalan, meningkat menjadi 20.300 orang per tahun, menunjukkan efektivitas regulasi dalam meningkatkan daya tarik wisata.

Tabel 2. Jumlah Wisatawan Sebelum dan Sesudah Kebijakan

Tahun	Jumlah Wisatawan	Presentase peningkatan
2022	10.500	-
2023	15.750	50 %
2024	20.300	30 %

Peningkatan ini tidak hanya memperbaiki taraf hidup masyarakat tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, seperti pengelola parkir, pemandu wisata, dan penyedia jasa kuliner lokal. Kolaborasi antara pemerintah desa, BUMDes Mardi Gemi, dan pelaku usaha lokal berhasil menggerakkan roda perekonomian melalui berbagai program pemberdayaan.

Dari aspek sosial, implementasi kebijakan ini telah mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berbagai program pelatihan dan pendampingan, seperti manajemen usaha kecil, pengembangan produk lokal, serta penyelenggaraan event budaya yang memperkuat rasa kebersamaan dan keterlibatan dalam pembangunan pariwisata.

Sementara itu, dari segi lingkungan, program penghijauan dan pengelolaan sampah berbasis komunitas menunjukkan upaya nyata dalam menjaga kelestarian alam. Lahan bekas tambang kapur yang sebelumnya terbengkalai kini telah direvitalisasi menjadi pasar ekologis yang ramah lingkungan, didukung oleh penanaman pohon, pembangunan fasilitas ramah lingkungan, dan edukasi kepada pengunjung tentang pentingnya pelestarian alam. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk memilah dan mendaur ulang sampah guna menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

Meskipun kebijakan ini membawa dampak positif, beberapa tantangan masih perlu diatasi, terutama terkait keterbatasan infrastruktur, fasilitas umum, serta aksesibilitas bagi wisatawan. Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman masyarakat mengenai konsep pariwisata berkelanjutan, sehingga diperlukan upaya sosialisasi yang lebih intensif.

Secara keseluruhan, implementasi Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 telah memberikan kontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penguatan sosial, dan pelestarian lingkungan di Desa Wisata Argo Wijil. Dengan terus mengatasi tantangan yang ada, potensi pariwisata berbasis masyarakat di Argo Wijil dapat terus berkembang secara berkelanjutan dan inklusif.

3.2. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu elemen penting dalam implementasi kebijakan Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023. Di Desa Wisata Argo Wijil, pemberdayaan dilakukan melalui penguatan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi wisata lokal dan peningkatan keterampilan usaha. Program pelatihan dan pendampingan yang dilakukan mencakup pelatihan manajemen usaha kecil, pengelolaan homestay, produksi kerajinan lokal, serta pengembangan kuliner khas daerah. Dengan adanya pelatihan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata.

Selain pelatihan, dukungan modal usaha juga diberikan melalui kolaborasi dengan BUMDes dan pemerintah desa. Dana bergulir dan fasilitas kredit usaha mikro membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka, baik dalam sektor perdagangan, jasa pariwisata, maupun produksi lokal. Pemberdayaan ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata.

Partisipasi masyarakat juga menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan di Argo Wijil. Keterlibatan warga dalam pengelolaan pasar wisata, penyelenggaraan acara budaya, dan pengelolaan fasilitas wisata menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi. Namun, tantangan masih ada, seperti kurangnya pemahaman sebagian masyarakat tentang pentingnya menjaga kualitas layanan dan kelestarian lingkungan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan peningkatan kesadaran dan edukasi melalui forum warga, diskusi kelompok, dan kampanye pariwisata berkelanjutan. Dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, pemberdayaan yang dilakukan diharapkan dapat menciptakan komunitas yang mandiri, inovatif, dan mampu menjaga keberlanjutan pariwisata di Argo Wijil.

3.3. Keberlanjutan Pariwisata

Keberlanjutan pariwisata di Desa Wisata Argo Wijil bergantung pada keseimbangan antara manfaat ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya. Program ekowisata yang diterapkan di desa ini telah memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan pendapatan masyarakat. Namun, untuk mencapai keberlanjutan yang optimal, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya setempat.

Upaya pelestarian lingkungan di Argo Wijil dilakukan melalui berbagai program, seperti penghijauan di area bekas tambang kapur, pengelolaan sampah berbasis komunitas, dan edukasi lingkungan kepada wisatawan dan masyarakat lokal. Program penghijauan melibatkan partisipasi masyarakat dalam menanam pohon dan merawat tanaman yang berfungsi untuk mengurangi dampak kerusakan lahan akibat aktivitas tambang sebelumnya. Sementara itu, program pengelolaan sampah berbasis komunitas dijalankan dengan mengajak warga untuk memilah sampah organik dan anorganik serta mendaur ulang limbah yang masih bisa digunakan. Langkah ini tidak hanya menjaga kebersihan lingkungan tetapi juga menciptakan peluang ekonomi melalui pengelolaan limbah yang bernilai ekonomis.

Di sisi lain, pelestarian budaya menjadi bagian penting dalam mendukung keberlanjutan pariwisata di Argo Wijil. Program seni dan budaya seperti pertunjukan tari tradisional, musik gamelan, dan festival lokal rutin diselenggarakan untuk menarik minat wisatawan sekaligus menjaga warisan budaya lokal. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan acara budaya ini menunjukkan adanya partisipasi aktif dalam menjaga identitas dan kearifan lokal.

Namun, tantangan dalam mewujudkan keberlanjutan pariwisata di Argo Wijil masih cukup besar. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran sebagian masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi mengenai prinsip-prinsip pariwisata

berkelanjutan kepada masyarakat dan pelaku usaha wisata.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, BUMDes, dan komunitas lokal perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program keberlanjutan. Dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai juga menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pelestarian budaya.

Dengan demikian, keberlanjutan pariwisata di Desa Wisata Argo Wijil tidak hanya bergantung pada manfaat ekonomi tetapi juga pada upaya berkelanjutan dalam menjaga kelestarian alam dan budaya lokal. Sinergi antara berbagai pemangku kepentingan dan kesadaran masyarakat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pariwisata yang ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 di Pasar Wisata Argo Wijil telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi kendala dalam optimalisasi sumber daya, koordinasi birokrasi, dan partisipasi masyarakat. Kebijakan ini memberikan manfaat berupa peningkatan peluang ekonomi, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan dukungan usaha kecil, serta pelestarian kearifan lokal.

Mengacu pada teori implementasi Edward III, keberhasilan kebijakan ini dipengaruhi oleh: (a) Komunikasi yang sudah berjalan, tetapi masih perlu diperluas; (b) Sumber daya yang terbatas, terutama dana dan tenaga ahli; (c) Disposisi pelaksana yang cukup baik, meski partisipasi masyarakat masih perlu didorong; dan (d) Struktur birokrasi yang memerlukan peningkatan koordinasi antarinstansi.

Dalam konteks pengembangan Pasar Wisata Argo Wijil, pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan pariwisata menjadi faktor penting. Pemberdayaan masyarakat telah meningkat melalui pelatihan dan dukungan usaha, meskipun

partisipasi aktif masih perlu diperkuat. Sementara itu, keberlanjutan pariwisata bergantung pada keseimbangan antara manfaat ekonomi dan pelestarian lingkungan serta budaya.

Secara keseluruhan, kebijakan ini membawa dampak positif bagi pengembangan Pasar Wisata Argo Wijil, namun upaya lebih lanjut masih diperlukan agar pengelolaan wisata semakin berkelanjutan dan bermanfaat jangka panjang bagi masyarakat.

5. SARAN

Saran Untuk mengatasi tantangan yang ada dan meningkatkan implementasi kebijakan, diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dengan menggandeng pihak swasta dan lembaga akademik, penguatan koordinasi antarinstansi melalui pembentukan tim kerja lintas sektor, peningkatan promosi pariwisata berbasis digital, serta pengembangan infrastruktur pendukung seperti akses jalan, fasilitas umum, dan sarana transportasi demi meningkatkan kenyamanan wisatawan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat lokal serta menjaga keberlanjutan potensi wisata di Desa Wisata Argo Wijil.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.

Jurnal Artikel

Octastefani, A., Prabaningrum, R., & Sadasri, D. (2018). Revitalisasi Area Bekas Tambang. *Jurnal Lingkungan Hidup*, 12(2), 45–56.

Rochmadi, A. (2022). Pengembangan Pasar Ekologis Argo Wijil. *Jurnal Pariwisata Berkelanjutan*, 10(1), 32–40.

Miftach, Z. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(3), 53–54.

Sujanto, B., & Nasrulloh, F. (2022). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan

Pasar Wisata. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 7(2), 78–90.

Krisdyatmiko, A., & Latifah, N. (2019). Analisis Keberlanjutan Pasar Ekologis. *Jurnal Pengembangan Wilayah*, 4(1), 15–29.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gunungkidul. (2023). *Statistik Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023*. Badan Pusat Statistik Indonesia.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. (2009). *Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 11*.

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul. (2024). *Laporan Statistik Pariwisata Tahun 2023*. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata. (2023). *Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 No. 7*.

7. SUMBER WEBSITE

<https://www.kememparekraf.go.id/hasil-pencarian/outlook-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif-20232024> – Penting untuk mendukung data dan kebijakan nasional di bidang pariwisata.

<https://gunungkidulkab.bps.go.id/id/statisticstable/2/MTMwIzI%3D/wisatawan.html> – Berguna untuk data statistik jumlah wisatawan di Gunungkidul.

<https://undana.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-Masyarakat-Pasar.pdf> – Relevan dengan pembahasan pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengelolaan pasar wisata.

<https://stipram.ac.id/146-pariwisata-berkelanjutan-pengertian-dan-prospek-kerja.html> – Mendukung konsep pariwisata berkelanjutan yang dibahas dalam jurnal.

<https://Pasargari.gunungkidulkab.go.id/first> – Sumber lokal yang memperkaya informasi mengenai implementasi kebijakan di wilayah studi.